

Pengadilan Korsel Keluarkan Surat Penangkapan Presiden Yoon

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 31/12/2024



ORINEWS.id – Kasus darurat militer Presiden Yoon Suk-Yeol yang mengguncangkan Korea Selatan dan memicu krisis [Politik](#) masih terus berlanjut.

Setelah dimakzulkan dalam sidang parlemen dan menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi, kini Yoon harus menghadapi ancaman penangkapan dari pengadilan tinggi negeri.

Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) menyebut pengadilan Korea Selatan telah menyetujui surat perintah penangkapan terhadap Yoon berkaitan dengan kasus darurat militer yang gagal awal Desember lalu.

“Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata CIO dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Yonhap News pada Selasa, 31 Desember 2024.

CIO mengatakan pihaknya juga belum mengetahui kapan pasti surat penangkapan itu dijalankan.

“Tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk proses selanjutnya,” tambahnya.

Ini adalah surat perintah penangkapan pertama yang dikeluarkan untuk seorang presiden petahana di Korea Selatan.

Dinas keamanan presiden Korea Selatan mengatakan bahwa mereka akan memperlakukan surat perintah penangkapan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Berdasarkan hukum Korea Selatan, lokasi yang berpotensi terkait dengan rahasia militer tidak dapat disita atau digeledah tanpa persetujuan dari orang yang bertanggung jawab, dan kecil kemungkinan Yoon akan meninggalkan kediamannya secara sukarela jika ia menghadapi penahanan.

Polisi dikerahkan pagi ini di luar kediaman Yoon di pusat kota Seoul, dalam upaya yang mungkin dilakukan untuk mencegah perkelahian.

Para pendukung dan pengunjuk rasa Yoon yang menyerukan pemecatannya telah mengintai kediamannya, dengan media lokal memuat gambar-gambar pertengkaran antara kedua kubu semalam.

Sebelumnya, polisi telah mencoba tetapi gagal untuk menyerbu kantor presiden sebagai bagian dari penyelidikan, karena dinas keamanan presiden memblokir akses.

Media lokal melaporkan bahwa penangkapan atau penggeledahan segera di kediaman presiden tidak mungkin dilakukan, karena para penyelidik mungkin akan berusaha berkoordinasi dengan dinas keamanan presiden.

Yoon menghadapi penyelidikan kriminal atas klaim pemberontakan. Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuduhan yang tidak dapat dikenai kekebalan hukum bagi presiden Korea Selatan.

Penjabat pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korea Selatan, Kwon Seong-dong mengatakan upaya menahan

presiden yang sedang menjabat adalah tindak tidak pantas.

Awal pekan ini, pejabat penegak hukum Korea Selatan meminta surat perintah tersebut. Mereka berencana untuk menginterogasi Yoon atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan mengatur pemberontakan.

Kekuasaan presidensial Yoon ditangguhkan setelah Majelis Nasional memilih untuk memakzulkannya pada tanggal 14 Desember atas pemberlakuan darurat militer yang hanya berlangsung beberapa jam tetapi telah memicu kekacauan politik selama berminggu-minggu, menghentikan diplomasi tingkat tinggi, dan mengguncang pasar keuangan.

Putusan pemakzulan Yoon akan dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa bulan ke depan.